

**FALSIFIKASI DEMOKRASI:  
BERPIKIR ULANG DEMOKRASI**



**Mohammad Mulyadi**

**FALSIFIKASI DEMOKRASI:  
BERPIKIR ULANG  
DEMOKRASI**

**Editor:  
Dr. Fitriani, AP., M.Si.**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jakarta, 2018

Falsifikasi demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi/Mohammad Mulyadi —Ed. 1;  
Cet. 1.—Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

xii + 134 hlm; 15,5 x 23 cm  
ISBN 978-602-433-705-6

Judul:  
Falsifikasi demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi  
Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si  
Editor: Dr. Fitriani, AP., M.Si.

Copyrights © 2018  
Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
*All rights reserved*

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama  
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan  
Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2018  
YOI: 1593.36.147.2018  
Desain sampul: Masugeng

Yayasan Pustaka Obor Indonesia  
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230, Indonesia  
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114  
F. + 62 (0)21 31924488  
E-mail: [yayasan\\_obor@cbn.net.id](mailto:yayasan_obor@cbn.net.id)  
[http: www.obor.or.id](http://www.obor.or.id)  
Yayasan Pustaka Obor (FB)  
[pustakaobor\\_id](#) (IG)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah...dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terbilang jumlahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Tulisan dalam buku ini lahir dalam kegalauan penulis yang melihat demokrasi dengan segala sendi-sendi yang membangunnya seolah menjadi sebuah konsep bahkan teori yang mampu memecahkan segala persoalan yang menimpa bangsa-bangsa di dunia. Bahkan demokrasi menjadi sebuah alat yang sangat ampuh untuk mengukur sebuah negara dikatakan mampu dewasa dalam berpolitik.

Padahal dengan segala kelemahannya kita seharusnya membuka mata, hati dan pikiran kita, bahwa demokrasi dengan segala rangkaian tragedi kemanusiaan yang mendahuluinya seolah menjadi alat untuk melegalkan tindakan “represif” sebagian negara kepada sebagian negara lainnya. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, seolah membenarkan negara mereka sendiri untuk melakukan kekerasan atau melakukan invasi.

Adanya perbedaan ideologi politik dunia yang diteruskan dengan pemaksaan dalam menganut ideologi tertentu akan menyebabkan perbenturan peradaban (*clash of civilizations*), yang dalam istilah Samuel Huntington sebenarnya adalah perbenturan ideologi-ideologi besar di dunia yang pada awalnya merupakan gerakan pemikiran yang kemudian diikuti dengan agenda aksi secara fisik (perang). Terjadinya perbenturan ini adalah akibat buntutnya dialog yang dibangun oleh berbagai ideologi sehingga perbedaan pemikiran berlanjut menjadi perbedaan lewat aksi kekerasan fisik.

Padahal, yang terjadi sebenarnya bukanlah perbenturan peradaban, tetapi perbenturan kepentingan hegemoni politik.

Ideologi politik sebuah negara, apakah itu demokrasi, monarki atau yang lainnya, bukanlah sebuah masalah, jika rakyat negara itu sudah merasa nyaman dengan ideologi tertentu. Jikalau ada elemen masyarakat yang mencoba melakukan kritik terhadap ideologi negara tersebut, maka itu hal yang wajar saja, namun tidak perlu mengganti ideologi tersebut dengan jalan revolusi berdarah dan perang saudara, karena ideologi sangat tergantung pada budaya dan kebutuhan rakyat sebuah negara yang tidak dapat dipaksakan.

Oleh karenanya para pegiat demokrasi, sering menyuarkan terjadi anomali demokrasi, yaitu penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain demokrasi yang didengungkan selama ini berjalan tidak sebagaimana mestinya. Banyak pengamat beranggapan bahwa demokrasi di Indonesia adalah bungkusnya saja yang demokrasi hakikatnya lebih merupakan oligarkis yang berbasis pada elite politik, suara rakyat selalu dijadikan dalih untuk melanggengkan kekuasaan sekaligus membungkam mereka yang bersuara kritis.

Ini berarti, demokrasi berkembang melalui kesalahan dan kekeliruan yang telah secara tidak langsung diterapkan oleh negara yang kerap dianggap sebagai kiblat demokrasi yaitu Amerika Serikat dan sekutunya. Eksistensi Tuhan dalam demokrasi tak dihiraukan. Demokrasi mengalami singularitas, di mana politik demokrasi mengabaikan hubungan manusia dengan etika dan hukum agama. Seluruh paradigma yang dibangun didasarkan oleh subjektivitas kepentingan untuk meraih keuntungan pragmatis semata. Inilah yang menjadikan demokrasi sejak awal kelahiran telah mengamali singularitas, yakni kondisi ketidakberaturan atau berantakan

Demokrasi dengan segala bentuk pelaksanaannya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dari praktek-praktek demokrasi yang berbuah pada ancaman disintegrasi bangsa,

konflik lokal di daerah; politik biaya mahal; korupsi kepala daerah dan anggota legislatif; dan lain sebagainya.

Oleh karenanya buku ini mengulas dengan sederhana beberapa bentuk konkret dari falsifikasi demokrasi, seperti: pemilihan kepala daerah secara langsung yang menemui banyak kekurangan di sana sini; dinamika Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam negara demokrasi; dan hubungan demokrasi dan birokrasi yang buruk.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna. Penulis merasa dengan segala keterbatasan yang dimiliki dalam menulis buku ini, tentu masih dibutuhkan kajian yang intensif agar dapat ditemukan pengetahuan-pengetahuan baru yang baik untuk kemaslahatan umat manusia.

Jakarta, 4 November 2018

Penulis

Mohammad Mulyadi





# KATA PENGANTAR

*Dr. H.M Hidayat Nur Wahid, MA*

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat Taufiq dan Inayah-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada saudara saya, Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M. Si, yang telah menyelesaikan buku yang berjudul *“Falsifikasi Demokrasi, Berpikir Ulang Demokrasi”*, ini dengan baik.

Saya pribadi sangat senang dengan adanya tulisan seperti ini, sebab di tengah banyak sanjungan terhadap ideologi demokrasi rasanya sedikit sekali orang yang mau mengkritik praktek-praktek demokrasi hari ini. Agar demokrasi kembali seperti “jati dirinya”, dengarkan suara rakyat untuk kebaikan bersama. Seperti yang disampaikan penulis, demokrasi lahir sebagai kritik keras terhadap oligarki dan monarki yang penuh bias dan ketidakadilan. Banyak negara yang menyakini bahwa demokrasi sebagai jalan keluar dari permasalahan keterbelakangan suatu negara.

Padahal sebagaimana kita ketahui praktek-praktek demokrasi juga banyak mengalami bias dan ketidakadilan. Amerika Serikat misalnya, dengan dalih demokrasi, Amerika dengan mudahnya berperang melawan negara yang dianggap selama ini belum berdemokrasi dengan baik. Dengan dalih demokrasi, Amerika dengan mudahnya memberikan bantuan kepada negara lain. Demokrasi diciderai dalam prakteknya, sehingga tidak mencerminkan realisasi dari tujuan awal dari demokrasi.

Namun euphoria dan hegemoni dunia Barat dalam memposisikan demokrasi sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kini memposisikan demokrasi sebagai sebuah produk yang sakral tak tersentuh. Padahal mestinya demokrasi tetap didudukkan pada proporsi yang seadil-adilnya agar dapat menghadirkan kemaslahatan bagi warga dunia.

Akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara saya Mulyadi, karena telah berhasil menyelesaikan buku ini dengan baik, walaupun dibahas secara ringkas dan sederhana tapi kita dapat memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan, bahwa sesungguhnya demokrasi dengan segala prakteknya bukanlah ideologi yang mampu mengatasi setiap persoalan yang terjadi pada suatu bangsa. Demokrasi masih membutuhkan banyak penyempurnaan konsep dan praktek agar tidak dijadikan “alat” pembenaran dalam melakukan sebuah tindakan yang dapat merugikan kehidupan manusia di muka bumi.

Jakarta, 4 November 2018  
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Kata Pengantar, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A	ix
<b>Pendahuluan</b>	1
Dalih Demokratisasi	1
Falsifikasi Demokrasi	9
<b><i>Black Hole</i> Demokrasi</b>	17
<b>Menakar Demokrasi</b>	31
<b>Dinamika Ormas dalam Negara Demokrasi</b>	45
<b>Pilkada Langsung Antara Harapan dan Kenyataan</b>	61
<b>Birokrasi dan Netralitas Aparatur Sipil Negara</b>	75
Netralitas Birokrasi	75
Netralitas ASN dalam Pilkada	84
<b>Fenomena Kotak Kosong</b>	95
<b>Janji Politik</b>	105
<b>Demokrasi dan Birokrasi Pelayanan Publik</b>	114
Demokrasi dan Perilaku Birokrat dalam Pelayanan Publik	114
Politisasi Birokrasi	119
<i>Black Box</i> Birokrasi	123

Daftar Pustaka	127
Indeks	129
Tentang Penulis	133

## DAFTAR PUSTAKA

- Blee, Kathleen M. 2012. *Democracy In The Making, How Activist Groups*. New York: Oxford University Press.
- Budiman, Hendra. 2015. *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta :Pustaka Yustisia.
- Fakih, Mansour. 2004. *Neoliberalisme dan Globalisasi*. Insist Pers.
- Friedman, Thomas L. 2005. *The World is Flat: A Brief History of Twenty-first Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Halim, Abdul. 2013. *Relasi Islam,Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang.
- Hobson, J. A. 1918. *Democracy after the war*. London: G. Allen & Unwin, ltd.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth*. New York: University of Oklahoma Press.
- Mann, Michael. 2005. *The Dark Side of Democracy Explaining Ethnic Cleansing*. New York: Cambridge University Press.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. *Kemiskinan. Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Azza Grafika.
- O'Toole, John. 2011. *The Right of Revolution: An Analysis of John Locke and Thomas Hobbes Social Contract Theories*. Boston College University Libraries.`
- Popper Karl R. 2008. *The Logic of Scientific Discovery* (Logika Penemuan Ilmiah), terj. Saut Pasaribu & Aji Sastrowardoyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Fadillah. 2003. *Partai politik dan kebijakan publik: Analisis Terhadap Kongruensi Janji Politik Partai Dengan Realisasi Produk Kebijakan Publik di Indonesia 1999-2003*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rasyid, Hatamar. 2017. *Pengantar Ilmu Politik Persepektif Barat dan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm 4
- Ross, Daniel. 2005. *Violent Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Saidi, Zaim. 2016. *Ilusi Demokrasi Kritik dan Otokritik Islam Menyongsong Kembalinya Tata Pemerintahan Islam Menurut Amal Madinah* Versi E-Book. Jakarta: Pustaka Adina
- Setiyono, Budi. 2007. *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi*. Semarang: Puskodak FISIP UNDIP.
- Setyodarmodjo, Soenarko. 2008. *Strong society. Analisa Dasar tentang Politik, Public Relations, dan Budaya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Varma, S.P. 2001. *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wattimena, Reza AA. 2010. *Bangsa Pengumbar Hasrat*. Surabaya: Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala
- Zainuddin, Sulthan. 2013. Resensi Buku Barrington Jr Moore.1967. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant In The Making Of The Modern World* dalam Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol.05 No. 02 Oktober 2013

# INDEKS

- Abraham Lincoln, 17  
aksi, 19, 37, 59  
    Anarkis, 50, 65  
Amerika Serikat, 3, 5, 7, 10, 17, 18,  
    31, 40  
Angkatan Muda Pancasila Indonesia  
    (AMPI), 48  
anarkis, 9, 24, 50, 51, 58, 65  
apatisme, 32  
Aparatur Sipil Negara (ASN), 84, 86,  
    87, 88, 90, 91, 93  
Barrington Moore, 18  
biaya, 22, 24, 25, 37, 64  
    politik, 65, 98  
*Black Box*, 123  
birokrasi, 21, 39, 72, 75, 77, 78, 81,  
    82, 84, 122, 124  
bupati, 65, 69, 74, 115  
  
*clash of civilizations*, 19  
  
daerah, 23  
Dekrit Presiden, 119  
demokrasi, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12,  
    17, 18, 20, 21, 23, 26, 40, 42  
    Barat, 18  
    di Indonesia, 9, 11, 22, 26, 27  
    erosi, 11  
    transaksional, 23  
Demokrasi Terpimpin, 119  
demonstrasi, 9, 10  
  
Denni Ross, 18  
DPRD, 31, 68, 69  
  
eksekutif, 3, 11, 80, 119  
  
Fadillah Putra, 33  
falsifikasi, 9, 11  
fenomena, 23, 31, 34, 41, 42, 58, 75,  
    78, 87, 92, 97  
Forum Betawi Rempug (FBR), 48  
Forum Komunikasi Putra Putri  
    Purnawirawan Polri, (FKPPI), 48  
Front Pembela Islam (FPI), 48  
  
globalisasi, 9, 61, 79  
golongan putih (golput), 31, 32, 33,  
    35, 38, 40  
gubernur, 64, 65, 69, 72, 74, 108  
  
Hak Asasi manusia (HAM), 9, 48, 51,  
    79  
harapan, 14, 17, 33, 63, 74, 77, 106,  
    114  
*hate speech*, 66  
hoaks, 66  
  
ideologi, 5, 7, 9, 17, 27, 96  
    politik, 19

- Indonesia, 5, 9, 20, 22, 24, 26, 30, 31, 39, 47, 50, 53, 63, 65, 70, 72, 75, 84, 114, 120  
birokrasi, 124  
layanan publik, 114, 115, 118, 120, 122, 126  
ormas di, 45  
reformasi birokrasi, 116  
sistem politik di, 69, 119
- Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), 35
- John Hobson, 4, 111
- John Locke, 17
- John O'Toole, 111
- Jusuf Kalla, 20, 21, 22
- kampanye, 6, 22, 25, 29, 37, 72, 89, 97, 105  
biaya, 25, 113  
janji, 29, 36, 107, 111, 112
- Karl R. Popper, 11, 12
- kebebasan, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 26, 41, 48, 51, 53, 59, 66, 81
- kekerasan, 19, 20
- kekuasaan, 2, 3, 4, 14, 17, 23, 26, 33, 52, 59, 74, 125
- kemerdekaan, 58
- kepala daerah, 15, 22, 24, 25, 27, 31, 36, 61, 65, 69, 73, 87, 106, 111
- kepemimpinan, 73, 97, 103, 111, 120, 122
- kepercayaan, 2, 10, 36, 41, 48, 63, 95, 98, 113
- keputusan, 21, 27
- kerusuhan, 9, 21, 24
- kewenangan, 7, 52, 65, 87, 89, 102
- kinerja, 32, 125
- komunikasi, 23, 38, 48, 49, 66, 112, 118, 123  
birokrasi, 123, 124  
politik, 23, 29, 81, 112
- konflik Ambon, 21
- konflik Lampung, 21
- konflik Poso, 21
- konstitusi, 4, 8, 47, 51, 58, 76, 79  
"kontrak politik", 109, 110
- korupsi, 22, 25, 36, 41, 63, 65, 66, 115, 123, 125
- kotak kosong, 95, 96, 97, 100, 101, 103
- legislatif, 3, 15, 17, 35, 107, 114, 119
- LSM, 46, 51, 52, 57
- mandat, 111
- Mansour Fakih, 9
- manusia, 6, 12, 54, 78, 108, 111
- masyarakat, 3, 7, 19, 21, 24, 28, 30, 112, 118
- Max Weber, 125
- modal, 24, 26, 37, 41, 63, 68, 102, 113
- monarki, 1, 3, 4, 18, 19  
absolut, 4  
konstitusional, 4  
parlementer, 4
- money politics*, 24, 63, 33, 34, 36, 41, 46, 47, 51, 54, 58, 61, 67, 70, 73, 74, 80, 96, 99, 102, 107, 114
- Montesquieu, 17
- moral, 41, 53, 111
- negara Barat, 5, 17
- negara Berkembang, 11, 32
- negara Timur Tengah, 6, 7, 19, 20
- netralitas, 75, 76, 81, 82, 84, 85, 88



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 45, 46, 49

*Non Government Organization* (NGO), 49

oligarki, 1, 3, 4, 7, 11, 14, 114

*Open Bidding*, 92

Orde Baru, 21, 34, 46, 47, 48, 53, 68, 69, 77, 84, 114, 119, 121

organisasi, 5, 30, 45, 46, 49, 50, 53, 78, 116, 124

organisasi masyarakat (ormas), 30, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59

dampak negatif dan positif, 49

Islam, 51

pembubaran, 51, 54

partai politik (parpol), 20, 23, 72, 96, 99, 120

partai, 5, 18, 20, 26, 27, 31, 47, 70, 75, 77, 79, 84, 92, 97, 119

partisipasi, 31, 33, 34, 35, 36, 41, 49, 62, 98, 107

partisipatif, 62

pelayanan, 34, 116, 117

publik, 114, 115

pemerintah, 1, 2, 11, 14, 21, 28, 31, 39, 41, 46, 51, 52, 57, 69, 82, 84, 91, 92, 113, 117, 123

pemilih, 20, 23, 31, 32, 34, 35, 67, 97, 98, 105, 107

pemilihan, 61, 65, 69, 70, 87, 101, 103, 107, 108, 114, 118

pemilihan umum (pemilu), 3, 22, 31, 62

pemimpin, 11, 14, 20, 23, 25, 32, 41, 63, 74, 97, 102, 107, 113, 120

peraturan, 39, 52

peserta, 73, 107

pemilu legislatif (pileg), 35, 114

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 22, 24, 29, 31, 38, 41, 61, 62, 65, 69, 70, 72, 73, 84, 85, 89, 95, 98, 100, 110

dengan calon tunggal, 100

langsung, 31, 41, 61, 63, 65, 70, 72, 73, 74, 114

serentak, 24, 35, 64, 98, 99

politik, 2, 4, 7, 11, 19, 20, 34, 50, 62, 69, 70, 75, 77

balas budi, 63

biaya, 65, 98

budaya, 70

demokrasi, 7, 12

dunia, 17, 19

feodal, 26, 27

komunalistik, 26, 27

komunikasi, 23, 29, 81, 112

konservatif, 30

kontrak, 106, 108, 110

mahar, 23, 25, 97, 115

modern, 82

organisasi, 53

partisipasi, 34, 35

reformasi, 61, 79

uang (*money politics*), 26, 27, 67, 68, 69, 114

politisasi, 120

preman, 50, 51

rakyat, 2, 3, 7, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 28, 29, 36, 41, 43, 48, 72, 73, 76, 79, 96, 98, 101, 106, 108, 110, 113, 122

reformasi, 20, 30, 34, 48, 61, 69, 75, 76, 77, 79, 84, 92, 114, 116, 126

revolusi, 6, 19, 126

rezim, 5, 21, 33, 48, 53, 59, 69

Samuel Huntington, 19, 29  
sipil, 6, 10, 20, 53, 75, 84  
sistem, 1, 3, 5, 22, 24, 27, 28, 30, 31,  
54, 59, 69, 78, 81, 100  
Standar Pelayanan Minimal (SPM),  
117, 126  
survei, 25, 35, 68, 124

Tan Malaka, 14  
Thomas Friedman, 9  
Thomas Jefferson, 4  
Thomas Hobbes, 111

uang mahar, 114  
undang-undang, 3, 24

Winston Churchill, 5

yudikatif, 3, 17

## TENTANG PENULIS



**MOHAMMAD MULYADI**, lahir di Makassar, 13 Maret 1976. Menyelesaikan studi Ahli Pemerintahan (AP) di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor tahun 1998, Magister Sosiologi Universitas Indonesia tahun 2002, Doktor Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran

tahun 2008.

Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Kepakaran Sosiologi Politik di Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan menjadi Konsultan Peneliti di beberapa lembaga pemerintah dan swasta.

Aktivitas kesehariannya banyak didedikasikan untuk menulis isu-isu sosial politik dan menjadi pembicara di beberapa seminar, *workshop* dan bimbingan teknis aparatur pemerintahan daerah dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia.

Tulisannya dalam bentuk buku antara lain: 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa; 2) Kemiskinan, Identifikasi Penyebab dan Strategi Penanggulangannya; 3) Metode Penelitian Praktis, Kuantitatif dan Kualitatif; 4) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, serta Praktek Kombinasinya dalam Peneltian Sosial; 5) Organisasi Masyarakat, Konsep dan Aplikasinya dalam Kehidupan Sosial; 6) Selamatkan Hati Kita; 7) Masalah Sosial, Beberapa Bentuk

Masalah Sosial di Masyarakat 8) Desa, Dinamika Kehidupan Sosial di Desa; 9) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (bagian dari buku); 10) Konsep Dasar dan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (bagian dari buku); 11) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (Bagian dari Buku); 12) Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat Adat; 13) Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) (bagian dari buku); 14) Pembangunan Manusia, Analisis Kritis Tentang Upaya Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia (bagian dari buku); 15) Telaah Konsep Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana (bagian dari buku); 16) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual (bagian buku); Peran Keluarga Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (bagian dari buku); 17) Strategi Pembangunan Sosial di Wilayah Pesisir (bagian dari buku). Penulis dapat dihubungi di alamat Email: mohammadmulyadi@yahoo.co.id